



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Perpanjangan Tenggat Pembahasan APBD 2020 Belum Disepakati

Banyak anggaran yang diduga bermasalah tapi lolos dalam pembahasan di komisi.

**Fransisco Rosarians**

fransisco@tempo.co.id

**JAKARTA** — Suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tidak bulat ihwal perpanjangan tenggat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Padahal masih banyak rencana anggaran yang dinilai bermasalah tapi diloloskan dalam pembahasan di tiap-tiap komisi.

“Tak pernah ada kesepakatan di pimpinan untuk kirim surat (ke Kementerian Dalam Negeri) untuk memperpanjang masa pembahasan APBD 2020,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, kepada *Tempo*, kemarin. “Lagipula, aturannya (pembahasan) memang harus selesai 30 November 2019.”

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD dari Partai Amanat Nasional, Zita Anjani, mengklaim pimpinan Dewan telah sepakat memperpanjang masa pembahasan APBD 2020. Dia menilai anggota Dewan masih membutuhkan waktu untuk memeriksa semua *item* Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) secara detail. Selain itu, tahapan pembahasan anggaran hingga penetapan APBD 2020 masih panjang. “Kami menginginkan pembahasan yang lebih detail,” ujarnya.

Suhaimi tidak sependapat dengan Zita. Menurut dia, pembahasan secara detail sudah dilakukan anggota Dewan di setiap komisi sejak 24 Oktober 2019. Selain itu, kata Suhaimi, anggaran-

anggaran tersebut nanti dikaji dan dibahas lagi di Badan Anggaran setelah ada penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2020. “Yang lolos sekarang akan diceklagi dalam tahap berikutnya,” katanya.

Menurut Suhaimi, anggota Dewan juga harus berpegang pada Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa anggota Dewan dan kepala daerah akan mendapat hukuman administratif jika pembahasan molor dari tenggat yang ditentukan. Sanksi itu berupa pemotongan seluruh gaji selama enam bulan. “Nantinya, kalau memang harus dibahas hingga malam pun, pasti dilakoni,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan *Tempo*, semua komisi DPRD telah menuntaskan pembahasan KUA-PPAS 2020 bersama satuan kerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah. Komisi B menjadi yang paling akhir dengan menggelar rapat finalisasi susunan KUA-PPAS bidang keuangan, kemarin. “Sudah dibicarakan dan keputusan sudah diambil. Saya akan tanda tangan dan akan dibahas di Badan Anggaran pada pekan depan,” kata Ketua Komisi B, Abdul Aziz.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono, juga mengatakan pembahasan APBD 2020 masih sesuai dengan tenggat. Karena itu, DPRD dan pemerintah provinsi segera menandatangani

nota kesepahaman KUA-PPAS 2020 karena pembahasan di tiap komisi sudah rampung.

“Tanda tangan nota kesepahaman awal pekan, lalu disusun jadi Raperda APBD 2020. Mungkin pekan berikutnya sudah bisa bahas di Badan Anggaran,” ucap Gembong. “Di Banggar tak akan lama karena mayoritas anggaran sudah dibahas.”

Partai Solidaritas Indonesia justru menilai banyak anggaran bermasalah yang diloloskan dalam pembahasan di komisi. Fraksi baru di DPRD Jakarta itu berencana tetap meminta pemerintah provinsi menysisir ulang anggaran berdasarkan prioritas kepentingan masyarakat. “Memang sudah dibahas di rapat (komisi), tapi kami akan coba membatalkan saat proses di Badan Anggaran,” kata anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra.

• TAUFIQ SIDDIQ

## Pembahasan Dikebut

**D**EWAN Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengebut pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020. Sebab, waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pembahasan sudah mendekati tenggat. Bahkan sejumlah tahapan pembahasan telah melenceng dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.

► Rancangan KUA-PPAS ke Kepala Daerah

• Kemendagri: Pekan pertama Juli 2019

• DKI: Pekan pertama Juli 2019

► Rancangan KUA-PPAS ke DPRD

• Kemendagri: Pekan ke-2 Juli 2019

• DKI: Pekan ke-2 Juli 2019

► Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD

• Kemendagri: Pekan ke-2 Juli-pekan pertama Agustus 2019

DKI (awal): 24 Oktober-4 November 2019

• DKI (rencana): 24 Oktober-15 November 2019

► Kesepakatan kepala daerah dengan DPRD ihwal rancangan KUA-PPAS

• Kemendagri: Pekan pertama Agustus 2019

• DKI (awal): 5 November 2019

• DKI (rencana): 18 November 2019

► Penerbitan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan RKA SKPD dan PPKD

• Kemendagri: Pekan pertama Agustus 2019

• DKI (awal): sesudah 5 November 2019

• DKI (rencana): 19 November 2019

► Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

• Kemendagri: Pekan ke-2 Agustus 2019

• DKI (rencana): 20-23 November 2019

► Pembahasan Raperda APBD dengan DPRD

• Kemendagri: Pekan pertama September-pekan ke-2 November 2019 (60 hari kerja)

• DKI (rencana): 26-28 November 2019

► Persetujuan DPRD dan kepala daerah atas Perda APBD

• Kemendagri: 30 November 2019

• DKI (rencana): 30 November 2019

• SUMBER: KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN WAWANCARA